BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum sampel penelitian serta deskriptif variabel. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data-data tersebut.Analisis data ini menggunakan bantuan *Software* computer SPSS Versi 15. Analisisi data ini bertujuan untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

A. Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini obyek yang dijadikan populasi adalah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi DIY.Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 33 provinsi di Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah.Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Bantul, GunungKidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta.Dari populasi tersebut kemudian akandipilih untuk menjadi sampel penelitian dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang kriterianya telah ditetapkan pada teknik pengambilan sampel.Sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD dari tahun 2006-2010 dan neraca keuangan dari tahun 2006-2010. Berikut akan dijelaskan tentang data-data Pemerintah Daerah yang menjadi sampel.

Total pendapatan, bagian daerah (total pendapatan transfer kecuali DAU, dana alokasi umum, belanja wajib (belanja pegawai dan pembayaran utang pokok), realisasi PAD dan target PAD, biaya pemungutan PAD, belanja aparatur, belanja pelayanan publik, belanja langsung, belanja tidak langsung, pokok angsuran

hutang, bunga diperoleh dari Laporan Realisasi anggaran APBD. Sedangkan untuk total utang yang terdiri dari utang jangka panjang dan utang jangka pendek diperoleh dari neraca keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY yaitu neraca tahun 2006 sampai dengan 2010.

B. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode *content analysis* Tujuannya yaitu untuk membuat pendugaan atas suatu teks (Utomo,1992 dalam Hendraryadi, 2011). Pendugaan tersebut dibuat menggunakan seperangkat prosedur, Prosedur analisis tersebut adalah:

Pemetaan Indikator Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan dari pemetaan Indikator Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Derah ini adalah untuk mencari besaran nilai setiap rasio keuangandan perubahannya antar Kabupaten dan Kota antara tahun 2006-2010.

a. Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil analisis rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY adalah sebagai berikut:

Dari tabel 4.1 Dapat dilihat bahwa kota Yogyakarta memiliki nilai kemandirian paling tinggi diantara 5 Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi DIY secara konsisten dari tahun 2006-2010 dengan nilai rata-rata 20% dan klasifikasi kurang. Dapat di lihat realisasi PAD kota Yogyakarta setiap tahunnya dari 2006-2010 mengalami kenaikan, dengan demikian rasio kemandirian setiap tahunnya juga mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kota

daerahnya dibandingkan dengan empat propinsilainnya. Dapat dilihat di tabel 4.1 bahwa Pendapatan Asli Daerah ke-lima Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dari tiap tahunnya kecuali Kabupaten Gunungkidul yang mengalami penurunan Realisasi PAD pada tahun 2007, namun nilai kemandirian masing-masing Kabupaten/Kota tidak serta merta naik, melainkan berfluktuasi.

TABEL 4.1.
Nilai Kemandirian Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di DIY 2006-2010

NO	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
1	Gunungkidul						
	Rasio Kemandirian	5.65%	4.79%	4.78%	5.40%	5.33%	5.19%
	Klasifikasi	Sangat kurang	Sangat kurang	Sangat kurang	Sangat kurang	Sangat kurang	Sangat kurang
	Peringkat	5	5	5	5	5	5
2	Bantul						
	Rasio Kemandirian	7.34%	7.86%	6.82%	10.05%	8.27%	8.07%
	Klasifikasi	Sangat kurang	Sangat kurang	Sangat kurang	Kurang	Sangat kurang	Sangat kurang
	Peringkat	3	3	3	3	3	3
3	Yogyakarta						
	Rasio Kemandirian	18.58%	18.53%	18.39%	21.53%	22.00%	19.81%
	Klasifikasi	Kurang	Kurang	Kurang	Sedang	Sedang	Sedang
	Peringkat	1	1	1	1	1	1
4	Sleman						
	Rasio Kemandirian	12.90%	14.62%	14.86%	15.78%	14.88%	14.61%
	Klasifikasi	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
	Peringkat	2	2	2	2	2	2
5	Kulonprogo						
	Rasio Kemandirian	7.85%	6.98%	6.88%	7.77%	7.63%	7.42%
	Klasifikasi	Sangat kurang	Sangat kurang	Sangat kurang	Sangat kurang	Sangat kurang	Sangat kurang
	Peringkat	4	4	4	4	4	4

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas juga dapat dilihat bahwa Kabupaten Gunungkidul memilikinilai kemandirian terendah secara berturut-turut dari tahun 2006 sampai 2010 dibandingkan empat Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi DIY dengan nilai rata-rata 5,19% dan klasifikasi sangat kurang.Hal ini dinilai wajar jika dibandingkan dengan ke-empat Kabupaten/Kota lainnya, Kabupaten Gunungkidul memang memiliki pendapatan aslidaerah yang paling sedikit.

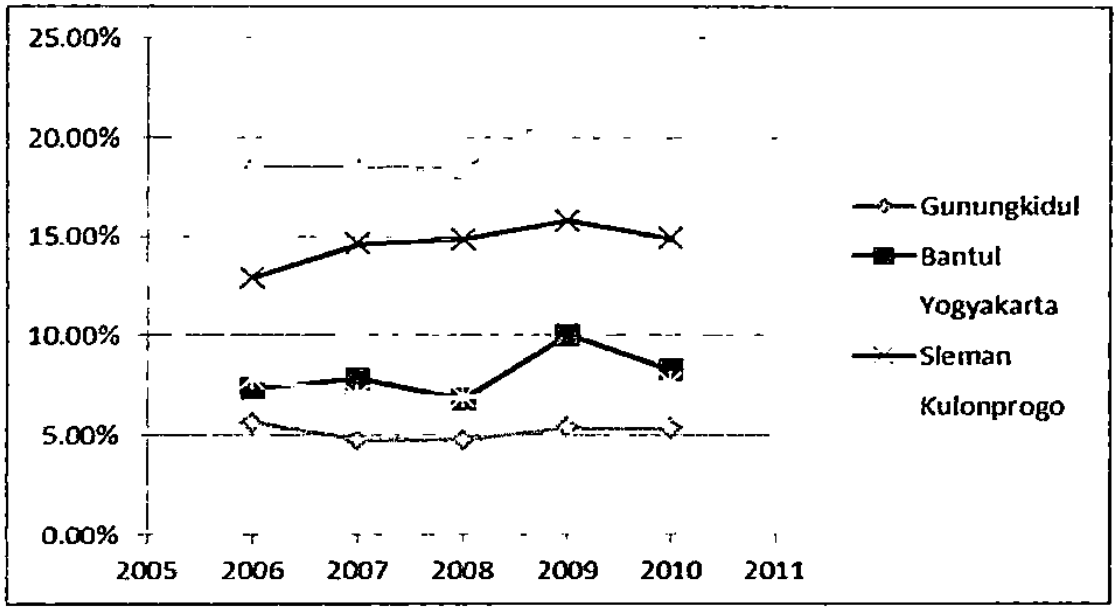

GAMBAR 4.1
Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY

Untk lebih jelas lagi dapat diliat gambar 4.1 bahwa tingkat kemandirian masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi DIY masih rendah.Namun dapat dilihat setiap Kabupaten/Kotanya mengalami kenaikan namun kenaikanya relatif kecil.Hal ini berarti stiap Kabupaten/Kota di Provinsi DIY masih ketergantungan sumber daya baik dari pemerintah pusat/propinsi. Untuk itu perlu adanya usaha pemerintah daerah untuk dapat mengurangi ketergantungan atas sumber dana

ekstern dan meminta kewenangan untuk dapat mengelolah sumber pendapatan lain, seperti Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Efektifitas Keuangan Daerah

Hasil analisis rasio efektifitas keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY adalah sebagai berikut:

TABEL 4.2.
Nilai Efektifitas Keuangan Daerah
Pada Kabupaten/Kota di DIY tahun 2006-2010

NO	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
1	Gunungkidul						
	Rasio Efektifitas	98.56%	129.92%	116.55%	106.12%	103.85%	111.00%
	Klasifikasi	Efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif
	Peringkat	5	1	3	5	2	3
2	Bantul						
	Rasio Efektifitas	138.47%	123.76%	118.17%	114.76%	91.71%	117.37%
	Klasifikasi	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Efektif	Sangat efektif
	Peringkat	1	3	2	2	5	2
3	Yogyakarta						
	Rasio Efektifitas	101.22%	109.54%	113.29%	111.02%	102.02%	107.42%
	Klasifikasi	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif
	Peringkat	4	4	4	3	3	5
4	Sleman						
	Rasio Efektifitas	119.68%	127.15%	131.73%	121.96%	99.71%	120.05%
	Klasifikasi	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Efektif	Sangat efektif
	Peringkat	2	2	1	1	4	1
5	Kulonprogo						
	Rasio Efektifitas	117.05%	106.69%	109.80%	106.52%	106.11%	109.23%
	Klasifikasi	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif
	Peringkat	3	5	5	4	1	4

Berdasarkan tabel 4.2. Dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota yang menunjukkan kemampuan merealisasikan pencapaian pendapatan asli daerah lebih dari target penerimaan yang direncanakan untuk tahun 2006-2010 adalah

Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo. Sedangkan Kabupaten Sleman dan Bantul pada tahun 2006-2009 sebenarnya menunjukkan kemampuan merealisasikan pencapaian target pendapatan asli daerah melebihi dari target penerimaan yang dianggarkan namun tidak pada tahun 2010. Untuk Kabupaten Gunungkidul juga mampu menunjukkan kemampuan merealisasikan pencapaian target pendapatan asli daerah melebihi dari target penerimaan yang dianggarkan untuk tahun 2007-2010, namun tidak untuk tahun 2006.

Namun dapat dilihat bahwa Kabupaten Sleman memiliki nilai rata-rata efetifitasnya paling tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya dengan nilai rata-rata 117,97%. Sedangkan untuk Kota Yogyakarta dengan nilai rata-rata 107,25% memiliki nilai efektifitas paling rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Kabupaten bantul pada tahun 2010 nilai efektifitasnya berada dibawah 4 Kabupaten/Kota lainnya sebesar 91,71 namun menduduki peringkat kedua dengan nilai rata-rata sebesar 112,52%, kabupaten gunungkidul menempati urutan ketiga dengan nilai rata-rata 109,30%. Dan yang yang menduduki peringkat ke empat adalah Kabupaten kulonprogo dengan nilai rata-rata 108,78%. Dengan demekian berarti pemerintah daerah untuk seluruh Kabupaten/Kota di DIY mampu merealisasikan pendapatan asli daerahnya secara efekif.

Dari gambar 4.2.dapat dilihat bahwa tingkat efektifitas pengelolahan keuangan daerah untuk seluruh Kabupaten/Kota di DIY adalah berfluktuasi. Tidak ada satupun Kabupaten/Kota yang nilai efektifitasnya terus naik atau terus turun dari

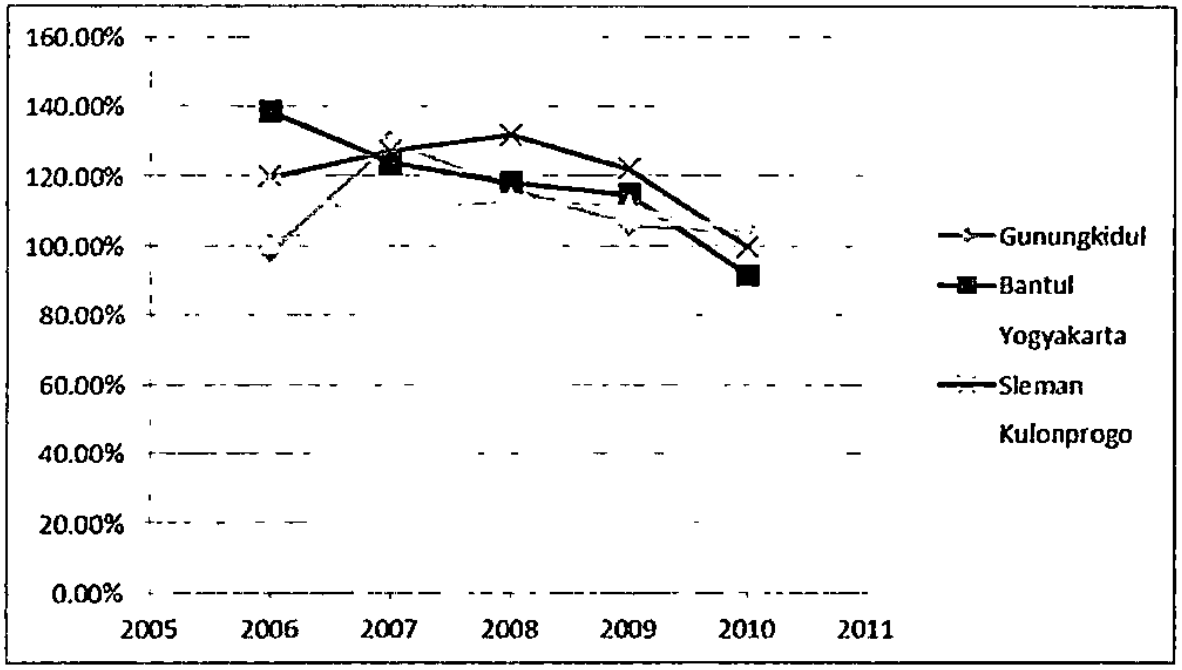

GAMBAR 4.2

Efektifitas Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY

c. Efisiensi Kuangan Daerah

Hasil analisis rasio efisiensi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY adalah sebagai berikut:

Berdasarkan table 4.3 Dapat dilihat Kabupaten/Kota yang memiliki nilai efisiensipaling rendah Kabupaten lainnya adalah Kota Yogyakarta pada tahun 2006 dengan nilai 11,15% dengan klasifikasi efisien, namun secara rata-rata selama 5 tahun tersebut nilai efisiensinya 236,86% dengan klasifikasi tidak efisien. Dapat dilihat juga seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi DIY pada tahun 2006 memiliki nilai rasio efisiensi dengan klasifikasi efisien, karena nilai rasionya dibawah 100%. Namun berdasarkan nilai rata-rata rasio efisiensi kelima Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi DIY dalam memungut pendapatan dikatagorikan tidak efesien.Karena

TABEL 4.3.
Nilai Efisiensi Kuangan Daerah
pada Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2006-2010

NO	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
1	Gunungkidul						
	Rasio Efisiensi	37.27%	985.82%	1134.89%	1120.37%	1287.79%	913.23%
	Klasifikasi	Efisien	Tidak efisien	Tidak efisien	Tidak efisien	Tidak efisien	Tidak efisien
	Peringkat	4	5	5	5	5	5
2	Bantul						
	Rasio Efisiensi	83.87%	668.40%	671.29%	584.08%	784.60%	558.45%
	Klasifikasi	Efisien	Tidak efisien	Tidak efisien	Tidak efisien	Tidak efisien	Tidak efisien
	Peringkat	5	3	3	3	3	3
3	Yogyakarta						
	Rasio Efisiensi	11.51%	291.16%	323.32%	235.58%	260.78%	224.47%
	Klasifikasi	Efisien	Tidak efisien	Tidak efisien	Tidak efisien	Tidak efisien	Tidak efisien
	Peringkat	1	1	1	1	1	1
4	Sleman						
	Rasio Efisiensi	15.65%	336.26%	359.89%	353.82%	422.55%	297.63%
	Klasifikasi	Efisien	Tidak efisien	Tidak efisien	Tidak efisien	Tidak efisien	Tidak efisien
	Peringkat	2	2	2	2	2	2
5	Kulonprogo						
	Rasio Efisiensi	24.68%	775.88%	832.49%	861.72%	955.85%	690.12%
	Klasifikasi	Efisien	tidak efisien	tidak efisien	tidak efisien	tidak efisien	tidak efisien
	Peringkat	3	4	4	4	4	4

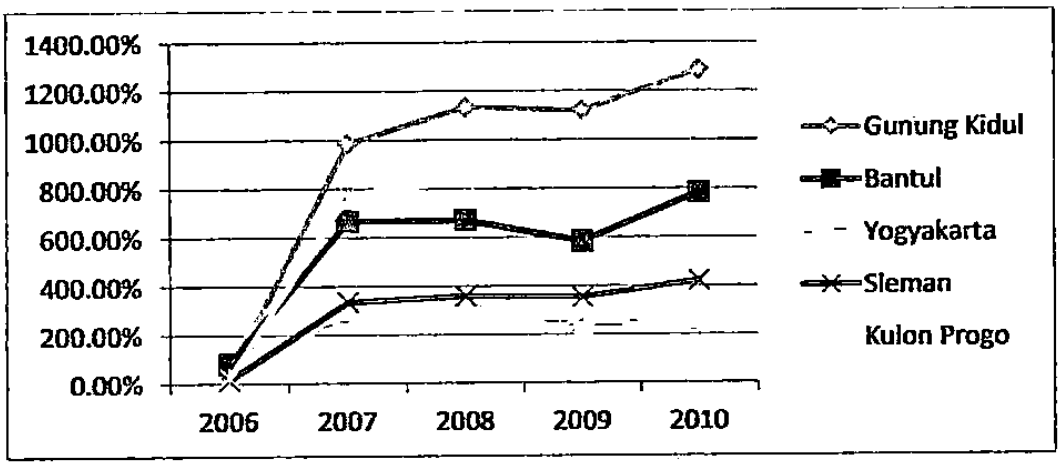

GAMBAR 4.3

Efisiensi Kuangan Daerah Kabupaten/Kota di DIY

Untuk lebih jelas dapat dilihat di gambar 4.3.rasio efisiensi Kabupaten/Kota di DIY yang dapat dikatakan efisiensi hanya di tahun 2006 karena nilai rasionya dibawah 100%. Sedangkat untuk tahun 2007-2010 dikatakan tidak efisien karena nilai rasio setiap Kabupaten/Kota lebih dari 100%.

d. Aktivitas Keuangan Daerah

1. Rasio Keserasian

Hasil analisis rasio keserasian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY yang meliputi rasio belanja aparatur/rasio belanja tidak langsung dan rasio belanja pelayanan publik/rasio belanja langsung dapat dilihat pada tabel 4.4.

Berdasarkan tabel 4.4. Dapat dilihat Kabupaten/Kota di DIY pada tahun 2006, Kota Yogyakarta memiliki Rasio Belanja Aparatur terendah dibandingkan dengan empat Kabupaten yang lainnya dengan nilai rasio 11,65% dan dapat dilihat juga Kota Yogyakarta memiliki nilai Rasio Belanja Publik tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten yang lainnya dengan nilai rasio 88,35%. Dengan demikian semakin rendah prosentase anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Aparatur, berarti prosentase Belanja Publik yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi cenderung semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya dapat dilihat Kabupaten Gunungkidul memiliki rasio belanja aparatur paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ad di DIY sebesar 58,3% dengan demikian Kabupaten Gunungkidul memiliki rasio belanja pelayanan publik cenderung rendah yaitu sebesar 32,75%. Karena semakin tinggi prosentase anggaran yang dialokasikan untuk belanja aparatur, berarti prosentase belanja

publik yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi cenderung semakin rendah.

Untuk lebih jelasnya mengenai belanja aparatur/belanja tidak langsung dapat dilihat pada gambar 4.4.Rasio belanja aparatur/belanja tidak langsung pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY mengalami kenaikkan dari tahun 2006-2010. Dapatdilihat juga tahun 2006 ke tahun 2007 mengalami kenaikan yang relative tinggi kecuali Kabupaten Gunungkidul sedangkanuntuk tahun 2007 sampai tahun 2010 kenaikannya relative rendah.Namun untuk Kabupaten Bantul pada tahun 2008 mengalami penurunan.

TABEL 4.4
Nilai Rasio Keserasian Keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY pada Tahun 2006-2010

NO	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
1	Gunungkidul						
	Rasio Belanja Aparatur/Belanja tdk Langsung	58.03%	59.56%	62.63%	72.03%	81.10%	66.67%
	Rasio Belanja Pelayanan Publik/Belanja Langsung	32.75%	40.44%	37.37%	27.97%	18.90%	31.49%
2	Bantul						
	Rasio Belanja Aparatur/Belanja tdk Langsung	21.71%	66.71%	57.22%	70.25%	71.66%	57.51%
	Rasio Belanja Pelayanan Publik/Belanja Langsung	78.29%	33.29%	42.78%	29.75%	28.34%	42.49%
3	Yogyakarta						
	Rasio Belanja Aparatur/Belanja tdk Langsung	11.65%	57.10%	59.45%	60.54%	59.85%	49.72%
	Rasio Belanja Pelayanan Publik/Belanja Langsung	88.35%	42.90%	40.55%	39.46%	40.15%	50.28%
4	Sleman						
	Rasio Belanja Aparatur/Belanja tdk Langsung	21.90%	63.97%	66.08%	66.17%	69.13%	57.45%
	Rasio Belanja Pelayanan Publik/Belanja Langsung	78.10%	36.03%	33.92%	33.83%	30.87%	42.55%
5	Kulonprogo						
	Rasio Belanja Aparatur/Belanja tdk Langsung	13.61%	57.46%	62.25%	75.89%	79.29%	57.70%
	Rasio Belanja Pelayanan Publik/Belanja Langsung	13.61%	57.46%	62.25%	75.89%	79.29%	57.70%

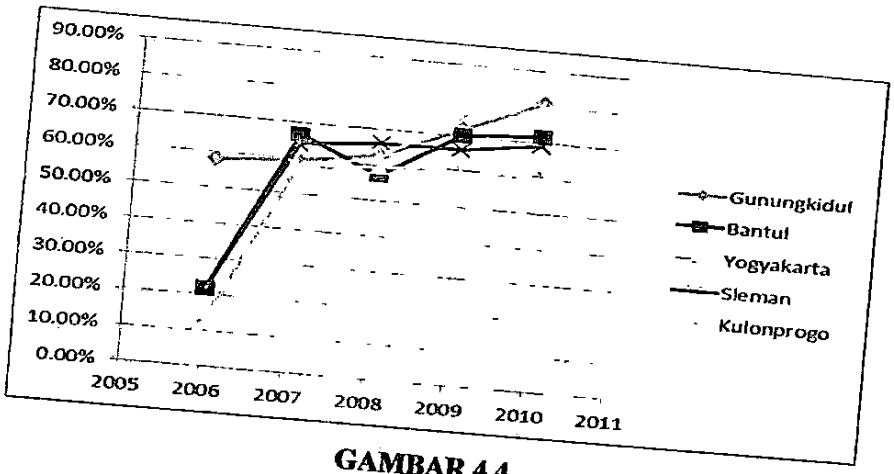

GAMBAR 4.4.

Belanja Aparatur/Belanja tidak Langsung Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY

Dari gambar 4.5.dapat dilihat nilai rasio belanja pelayanan publik/belanja langsung pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dari tahun 2006-2010 tidak ada yang mengalami kenaikanataupun penurunan yang relative tinggi. Namun ditahun 2007 mengalami penurunan yang relative tinggi namun tidak keseluruhan Kabupaten/Kota, melainkan hanya Kabupaten gunungkidul, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Untuk tahun 2008-2010 mengalami penurunan namun relative rendah.

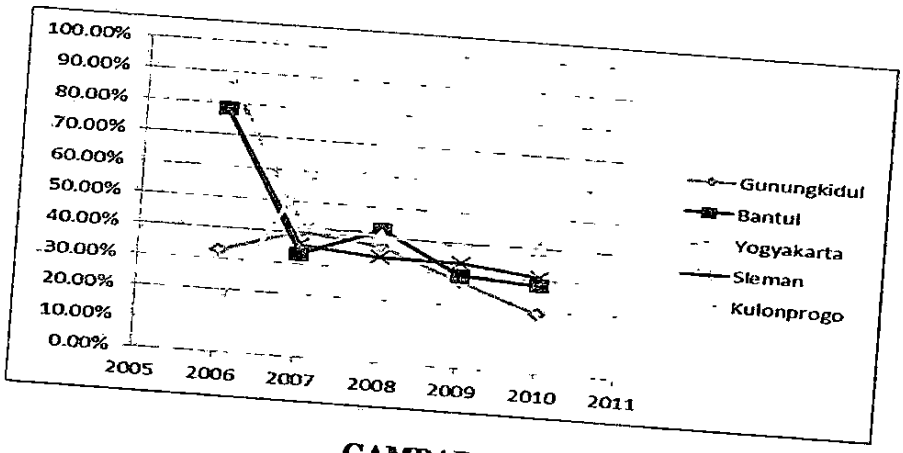

GAMBAR 4.5.

Belanja Pelayanan Publik/Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

2. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selainmenggunakan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternative sumber dana lain seperti pinjaman. Untuk dapat melihat kemampuan pemerintah daerahdalam melakukan pinjaman dapat dilakukan dengan menghitung *Debt Service CoverageRasio* (DSCR), artinya bahwa apakah pemerintah daerah layak atau tidak untuk melakukanpinjaman. Pemerintah daerah yang layak melakukan pinjaman harus mempunyai nilaiDSCR minimal 2,5.

Hasil analisis DSCR dapat dilihat ditabel 4.5. Dari tebel tersebut dapat dilihat bahwa semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi DIY mempunyai angsuran pokok hutang pada tahun 2006-2010. Nilai rata-rata DSCR semua Kabupaten/Kota di Provinsi DIY di atas 2,5 hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi DIY mampu melakukan pembayaran jika melakukan pinjaman. Untuk nilai DCSR setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY yang mengalami kenaikan pada tahun 2006-2010 hanya Kota Yogyakarta, sedangkan untuk kabupaten yang lainnya tidak mengalami kenaikan ataupun penururan pada tiap tahunnya. Namun nilai rata-rata DSCR paling rendah adalah Kota Yogyakarta yaitu sejumlah 204.5, sedangkan untuk nilai DSCR paling tinggi adalah Kabupaten Gunungkidul sejumlah 1556,75.

TABEL 4.5.
Nilai DSCR Pemerintahpada
Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY Pada Tahun 2006-2010

NO	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
1	Gunungkidul						
	Rasio DSCR	1574.3	2083.26	2154.4	1582.74	389.06	1556.752
2	Bantul						
	Rasio DSCR	2133.3	1260.68	1299.8	1230.92	718.56	1328.652
3	Yogyakarta						
	Rasio DSCR	161.8	173.22	187.77	214.3	285.41	204.5
4	Sleman						
	Rasio DSCR	2236.68	1226.09	142.31	1325.89	992.57	1184.708
5	Kulonprogo						
	Rasio DSCR	2023.54	983.41	931.62	42.36	466.3	889.446

3. Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil analisis rasioUtang terhadap Pendapatan Asli DaerahKabupaten dan Kota di Provinsi DIY adalah sebagai berikut:

Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utangnya dengan pendapatan asli daerah. Semakin rendah nilai rasio ini maka akan semakin baik. Berdasarkan tabel 4.6. Dapat dilihat Kabupaten Sleman pada tahun 2007-2010 mengalami penurunan rasio utang terhadap PAD. Dilihat dari nilai rata-rata rasio utang terhadap PAD yang memiliki rata-rata palng terkecil adalah Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.Sedangkan yang memiliki nilai rata-rata rasio utang terhadap PAD terbesar adalah Kabupaten

TABEL 4.7
Nilai Rasio Utang terhadap Total Pendapatan
Pemerintah Kabopaten/Kota di DIY pada Tahun 2006-2010

NO	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
1	Gunungkidul						
	Rasio Utang terhadap PAD	0.20%	0.28%	0.11%	0.15%	0.22%	0.19%
	Klasifikasi	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik
	Peringkat	1	1	1	2	2	1
2	Bantul						
	Rasio Utang terhadap PAD	0.76%	0.58%	0.53%	0.11%	0.08%	0.41%
	Klasifikasi	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik
	Peringkat	4	3	2	1	1	2
3	Yogyakarta						
	Rasio Utang terhadap PAD	1.58%	0.65%	0.95%	0.68%	0.49%	0.87%
	Klasifikasi	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik
	Peringkat	5	4	4	4	5	5
4	Sleman						
	Rasio Utang terhadap PAD	0.70%	1.03%	0.90%	0.44%	0.27%	0.67%
	Klasifikasi	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik
	Peringkat	3	5	3	3	3	4
5	Kulonprogo						
	Rasio Utang terhadap PAD	0.39%	0.44%	0.97%	0.89%	0.34%	0.61%
	Klasifikasi	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik
	Peringkat	2	2	5	5	4	3

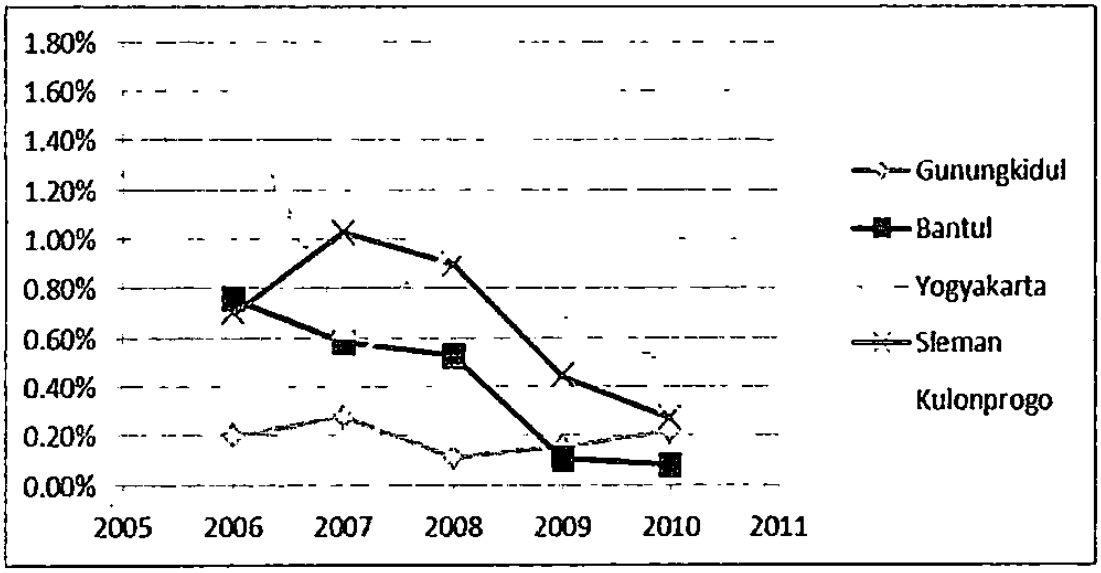

GAMBAR 4.7.
Utang terhadap total Pendapatan Kabupaten/Kota di DIY

Hasil dari Pemetaan Indikator Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 4.8.

TABEL 4.8.
Data Kinerja Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota DIY pada tahun 2006-2010

Kabupaten/Kota	Kemandirian	Efektifitas	Efisiensi	Aktivitas					Rerata	Peringkat
				Rasio Keserasian		DSCR	utang thd PAD	utang thd PD		
				Belanja Aaparatur	Belanja Publik					
Gunungkidul	5.19	109.30	954.87	66.67	30.86	1145.97	4.00	0.19	144.71	2
Bantul	8.09	112.52	599.52	57.51	42.49	1366.21	5.00	0.38	171.81	1
Yogyakarta	19.99	107.25	236.89	49.72	47.58	204.50	4.00	0.82	26.15	5
Sleman	14.72	117.97	322.98	60.42	39.58	556.55	4.00	0.64	70.27	4
Kulonprogo	7.41	108.78	718.45	59.95	59.95	889.45	8.00	0.62	112.38	3

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa secara rata-rata kinerja keuangan Kabupaten Bantul berada diperingkat pertama dengan 171,81%, Kabupaten Gunungkidul di peringkat kedua dengan 144,71%, Kabupaten Kulonprogo berada di peringkat tiga dengan rata-rata 112,38%, Kabupaten sleman berada di peringkat keempat dengan nilai rata-rata 70,27% dan Kota Yogyakarta berada diperingkat terakhir dengan nilai rata-rata 26,15%.

C. Uji Statistik Diskriptif

Uji statistik Diskriptif dalam penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan deskripsi mengenai data yang diperoleh. Dari analisis statistik ini akan diperoleh mean, nilai terendah, dan nilai tertinggi, serta standar deviasi dari data yang diolah. Dari hasil Analisis Statistik Deskriptifdiperoleh hasil sebagai berikut:

TABEL 4.9

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistics

		KEMANDIRIAN	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	RASIO BELANJA APARATUR	RASIO BELANJA PUBLIK	RASIO UTANG THD PAD	RASIO UTANG THD TOT PENDAPATAN KAB	DSCR
N	Valid	5	5	5	5	5	5	5	5
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		11.0800	91.1640	566.5360	59.2000	44.0920	5.0180	.5300	103281.1
Median		8.0900	108.7800	599.5200	59.9500	42.4900	4.3500	.6200	118470.7
Mode		5.19[a]	9.30[a]	236.86[a]	49.72[a]	30.86[a]	3.67[a]	.19[a]	20449.92[a]
Std. Deviation		6.11839	45.94953	292.82029	6.69734	10.74305	1.87487	.24617	52243.72
Minimum		*5.19*	*9.30*	*236.86*	*49.72*	*30.86*	*3.67*	*.19*	*20449.92*
Maximum		19.99	117.97	954.87	68.40	59.95	8.31	.82	155675.13

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Dari hasil uji statistik diskriptif diatas dapat dilihat nilai minimum rasio kemandirian adalah 5.19% sedangkan nilai maksimumnya adalah 19.99%, nilai minimum rasio efektifitas adalah 9.30% sedangkan nilai maksimumnya adalah 117.97%, nilai minimum rasio efisiensi adalah 236.86% sedangkan nilai maksimumnya adalah 954.87%, nilai minimum rasio belanja aparatur adalah 49.72% sedangkan nilai maksimumnya adalah 68.40% dan nilai minimum rasio belanja pelayanan public adalah 30.86 sedangkan nilai maksimumnya adalah 59.95. nilai minimum rasio utang terhadap PAD adalah 3.67% sedangkan nilai maksimumnya adalah 8.31%, dan nilai minimum rasio utang terhadap total pendapatan adalah 0.19% sedangkan nilai maksimumnya adalah 0.82%.

D. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data rasio-rasio keuangan dilakukan dengan menggunakan metode kolmogorov-smirnov untuk tahun 2006-2010.Menggunakan metode ini karena Kolmogorov simirnov merupakan metode yang umum digunakan untuk menguji normalitas data dengan jumlah data kurang dari 30 sampel.Data dikatakan

Jika nilai sig>0.05 Hasil uji normalitas data dapat dilihat dibawah ini

TABEL 4.10
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

	Rasio Kemandirian	Rasio Efektifitas	Rasio Efisiensi	Rasio Belanja Aparatur	Rasio Belanja Publik	DSCR	Rasio utang thd PAD	Rasio Utang thd Pendapatan
Asymp. Sig.	.942	.982	.585	.416	.070	.713	.920	.966

Berdasarkan hasil uji beda Kolmogorov-Smirnov Test di atas menunjukkan rasio kemandirian memiliki nilai sig 0.942>0.05 dengan demikina rasio kemandirian berdistribusi normal. Rasio efektifitas memiliki nilai sig 0.982>0.05 yang artinya rasio efektifitas sebaran datanya berdistribusi normal. Rasio efisiensi memiliki nilai sig 0.585>0.05 dengan demikian rasio efisiensi berdistribusi normal. Rasio belanja aparatur memiliki nilai sig 0.416>0.05 dengan demikian rasio belanja aparatur datanya berdistribusi normal. Kemudian rasio belanja publik sig 0.070>0.05 dengan demikian rasio belanja publik berdistribusi normal.Untuk DSCR sig 0.713>0.05 yang artinya DSCR sebaran datanya berdistribusi normal.Kemudian rasio utang terhadap PAD memiliki sig 0.920>0.05 dengan demikian rasio utang taerhadap PAD berdistribusi normal. Dan rasio utang terhadap total pendapatan memiliki nilai sig 0.966>0.05 yang berarti sebaran datanya berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua rasio keuangan telah lulus uji normalitas yang artinya data berdistribusi normal. Untuk lebih jelas hasil uji normalitas Kolmogorov Smirnov Test dapat dilihat di

E. Uji Hipotesis

1. Anova (Hipotesis 1-8)

Pengujian hipotesis menggunakan uji Anova, uji anova dimaksud untuk mengetahui apakah kinerja kuangan yang berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio aktifitas antar Kabupaten/Kota antara tahun 2006-2010 ada perbedaan atau tidak.Ringkasan hasil pengujian anova dapat dilihat dibawah ini, namun sebelum di lakukan uji anova sebelumnya dilakukan uji Homogenitas terlebih dahulu.

a. Kemandirian

Hasil pengujian homogenitas rasio kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY pada tahun 2006-2010adalah sebagai berikut:

TABEL 4.11
Uji Homogenitas Rasio Kemandirian

Variabel	Sig.	Keterangan
Kemandirian	0.612	Homogen

Uji Homogenitas dilakukan untuk mengetahui varian dalam pengujian ini, sama atau berbeda. Apabila sama maka dapat dilakukan uji yang selanjutnya yaitu uji Anova. Karena dalam uji Anova variannya harus sama atau homogen. Dapat dilihat dalam Uji Homogenitas diatas bahwa nilai sig 0.612 > 0.05 jadi variansnya homogen. Dengan demikian kinerja kemandirian dapat dilakukan uji anova.

Hasil uji anova rasio kemandirian dapat dilihat pada tabel 4.12, pengujian datadengan menggunakan uji anova untuk rasio kemandirian yaitu nilai sig

Provinsi DIY antara tahun 2006-2010. Dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan rasio kemandirian antar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010.

TABEL 4.12
Hasil Uji Anova Rasio Kemandirian

ANOVA

KINERJA2

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.068	4	.017	32.479	.000
Within Groups	.010	20	.001		
Total	.078	24			

b. Efektifitas

Hasil pengujian homogenitas rasio Efektifitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY pada tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.13
Uji Homogenitas Rasio Efektifitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Efektifitas	0.421	Homogen

Dari hasil uji homogenitas pada tabel 4.13 diketahui nilai sig 0.421>0.05 jadi variansnya homogen. Dengan demikian rasio efektifitas dapat dilakukan uji Anova.

TABEL 4.14
Hasil Uji Anova Rasio Efektifitas

ANOVA

KINERJA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.178	4	.044	4.542	.009
Within Groups	.196	20	.010		
Total	.374	24			

Hasil uji anova rasio efektifitas keuangan dapat dilihat di tabel 4.14, menunjukkan bahwa rasio efektifitas memiliki nilai sig 0.009<0.05 dan dapat disimpulkan bahwa rasio efektifitas ada perbedaan rasio efektifitas antar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010. Dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan rasio efektifitas antar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010.

c. Efisiensi

Hasil uji homogenitas rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY pada tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.15
Uji Homogenitas Rasio Efisiensi

Variabel	Sig.	Keterangan
Efisiensi	0.238	Homogen

Dari hasil uji homogenitas pada tabel 4.15 dapat dilihat bahwa rasio efisiensi memiliki nilai sig 0.238>0.05 berarti variansnya homogen, dan untuk rasio efisiensi dapat dilakukan uji selanjutnya yaitu uji anova.

TABEL 4.16
Hasil Uji Anova Rasio Efisiensi

ANOVA

KINERJA3

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	160.213	4	40.053	3.923	.016
Within Groups	204.191	20	10.210		
Total	364.405	24			

Hasil uji anova dapat dilihat pada tabel 4.16, dari tabel tersebut dapat dilihat rasio efisiensi memiliki nilai sig 0.016>0.05 dan dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rasio efisiensiantar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan rasio efisiensi antar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010.

d. Aktivitas

1). Rasio Belanja Aparatur/Belanja Tidak Langsung

Hasil uji homogenitas rasio Belanja Aparatur/Belanja Tidak Langsung Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY pada tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.17
Uji Homogenitas
Rasio Belanja Aparatur/Belanja Tidak Langsung

Variabel	Sig.	Keterangan
Rasio Belanja Aparatur	0.797	Homogen

Dari hasil uji homogenitas pada tabel 4.17 dapat dilihat bahwa rasio belanja aparatur memiliki nilai sig 0.797>0.05 berarti variansnya homogen, dengan demikian untuk rasio efisiensi dapat dilakukan uji selanjutnya yaitu uji anova

TABEL 4.18
Hasil Uji Anova Rasio Belanja Aparatur/Belanja Tidak Langsung

ANOVA

KINERJA4

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.072	4	.018	.435	.782
Within Groups	.828	20	.041		
Total	.900	24			

Dari hasil uji anova pada tabel 4.18 dapat dilihat rasio belanja aparatur memiliki nilai sig 0.782>0.05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rasio belanja aparatur antar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010. Dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan rasio belanja aparatur antar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010.

2). Rasio Belanja Publik/Belanja Langsung

Hasil uji homogenitas rasio Belanja Belanja Publik/Belanja Langsung Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY pada tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.19
Uji HomogenitasRasio Belanja Publik/Belanja Langsung

Variabel	Sig.	Keterangan
Rasio Belanja Publik	0.692	Homogen

Dari hasil uji homogenitas pada tabel 4.19 dapat dilihat bahwa rasio belanja publik memiliki nilai sig 0.692>0.05 berarti variansnya homogen dengan

demikian untuk rasio belanja publik dapat dilakukan uji selanjutnya yaitu uji anova.

TABEL 4.20
Hasil Uji Anova Rasio Belanja Publik/Belanja Langsung

ANOVA

KINERJA5

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.192	4	.048	1.173	.353
Within Groups	.819	20	.041		
Total	1.011	24			

Dari hasil uji anova pada tabel 4.20 dapat dilihat rasio belanja publik memiliki nilai sig 0.353>0.05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rasio belanja publik antar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010. Dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan rasio rasio belanja publik antar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010.

3). *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

Hasil uji homogenitas DSCR Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY pada tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.21
Hasil Uji Homogenitas DSCR

Variabel	Sig.	Keterangan
Rasio DSCR	0.354	Homogen

Dari hasil uji homogenitas tabel 4.21 dapat dilihat bahwa rasio DSCR memiliki nilai sig 0.354>0.05 berarti variansnya homogen, dan untuk rasio

TABEL 4.22
Hasil Uji AnovaDSCR

ANOVA

KINERJA8

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	5458813	4	1364703.332	3.645	.022
Within Groups	7488458	20	374422.888		
Total	12947271	24			

Dari hasil uji anova pada tabel 4.22 dapat dilihat rasio DSCR memiliki nilai sig 0.022<0.05 dan dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rasio DSCRantar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H6 diterima yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan rasio DSCR antar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010.

4). Rasio Utang terhadap PAD

Hasil uji homogenitas Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY pada tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.23
Hasil Uji HomogenitasRasio Utang terhadap PAD

Variabel	Sig.	Keterangan
Rasio Utang terhadap PAD	0.432	Homogen

Dari uji homogenitas pada tabel 4.23 dapat dilihat bahwa rasio utang terhadap PAD memiliki nilai sig 0.432>0.05 berarti variansnya homogen, dengan

TABEL 4.24
Hasil Uji AnovaRasio Utang terhadap PAD

ANOVA

KINERJA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.009	4	.002	6.392	.002
Within Groups	.007	20	.000		
Total	.016	24			

Dari hasil uji anova pada tabel 4.24 dapat dilihat rasio utang terhadap PAD memiliki nilai sig 0.002<0.05 dan dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rasio utang terhadap PADantar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H7 diterima yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan rasio utang terhadap PAD antar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010.

5). Rasio Utang terhadap Total Pendapatan

Hasil uji homogenitas Rasio Utang terhadap Total Pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY pada tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.25
Hasil Uji HomogenitasRasio Utang terhadap PAD

Variabel	Sig.	Keterangan
Rasio Utang terhadap Total Pendapatan	0.406	Homogen

Dari hasil uji homogenitas pada tabel 4.25 dapat dilihat bahwa rasio utang terhadap total pendapatan memiliki nilai sig 0.406>0.05 berarti variansnya

TABEL 4.26
Hasil Uji AnovaRasio Utang terhadap Total Pendapatan

ANOVA

KINERJA7

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.000	4	.000	1.343	.289
Within Groups	.000	20	.000		
Total	.000	24			

Dari hasil uji anova pada tabel 4.24 dapat dilihat rasio utang terhadap total pendapatan memiliki nilai sig 0.289>0.05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan utang terhadap total pendapatan antar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010. Dapat disimpulkan bahwa H8 ditolak yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan rasio utang terhadap total pendapatan antar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010.

6. Uji Manova (Uji Hipotesis 9)

Uji manova dilakukan untuk menguji hipotesis ke9 dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan rasio kinerja keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio aktivitas dengan menggunakan uji manova seluruh rasio keuangan tersebut diuji secara bersamaan.

Dari hasil uji manova pada tabel 4.25 dapat dilihat nilai sig pada Hotelling's Trace karena dalam penelitian ini variable terikatnya lebih dari 2 yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktifitas (rasio keserasian, rasio utang terhadap PAD, rasio utang terhadap total pendapatan dan rasio DSCR) . Dapat dilihat nilai sig 0.000<0.05 berarti uji manova menunjukkan adanya perbedaan rasio kinerja keuangan antar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-

2010.Dapat disimpulkan bahwa H9diterima, berarti terdapat berbedaan yang signifikan rasio kinerja keuangan antar Kabupaten/Kota antara tahun 2006-2010.

TABEL 4.27
Hasil Uji manova Rasio Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY

Multivariate Tests[c]

Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.
Intercept	Pillai's Trace	.998	703.610[a]	8.000	13.000	.000
	Wilks' Lambda	.002	703.610[a]	8.000	13.000	.000
	Hotelling's Trace	432.991	703.610[a]	8.000	13.000	.000
	Roy's Largest Root	432.991	703.610[a]	8.000	13.000	.000
KABUPATEN	Pillai's Trace	1.936	1.876	32.000	64.000	.016
	Wilks' Lambda	.005	4.803	32.000	49.537	.000
	Hotelling's Trace	53.937	19.384	32.000	46.000	.000
	Roy's Largest Root	52.290	104.579[b]	8.000	16.000	.000

a. Exact statistic

b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

c. Design: Intercept+KABUPATEN

F. Pembahasan

Pengujian pertama, H_1 menunjukkan bahwa rasio kemandirian memiliki nilai sig 0.000<0.05 dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan rasio kemendirian antar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010.Penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pasrah (2007: 198) dalam Susantih dan Saftiana (2010:6) telah melakukan penelitian tentang analisis kinerjadan kemandirian keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daearh Sumatera Selatan cenderung berfluktuasi dengan rata-rata pertahun adalah 48,50 persen. Selanjutnya variabel kinerja berpengaruh

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.

Pengujian kedua, H_2 menunjukkan bahwarasio efektifitas memiliki nilai sig 0.009<0.05 dan dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan rasio efektifitas antar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010. Penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simatupang (2007: 88) dalam Susantih dan Saftiana (2010:6) mengenai evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan indikator efektifitas, efisiensi, perkembangan APBD dan kemampuan keuangan daerah, dengan hasil penelitian bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peringkat terbaik atas evaluasi APBD yang dilakukan sedangkan Kabupaten Musi Rawas berada pada peringkat terendah. Selain itu juga digunakan uji beda*Kolmogorof Smirnov* dengan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan akan evaluasi pelaksanaan APBD antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Selanjutnya berdasarkan *Mann-Whitney Test* secara statistik tidak terdapat perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD pada kabupaten dan kota, dan tidak terdapat perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD pada kabupaten/kota pemekaran dengan kabupaten/kota non pemekaran.

Pengujian yang ketiga, H_3 menunjukkan bahwa rasio efisiensi memiliki nilai sig 0.016<0.05 dan dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan rasio efisiensi antar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010.Penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samson (2001: 41) dalam Susantih dan Saftiana (2010:6) penelitian tentang indikator-indikator keberhasilan pengelolaan

keuangan daerah di Kabupaten Barito Kuala 1995/1996 –1999/2000.Indikator yang dimaksud adalah indikator kinerja efektifitas, efisiensi, rasio investasi (COR) dan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menggambarkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Barito Kuala menunjukkan hasil rata-rata sangat efektif yang ditunjukkan dengan rasio efektifitas 104 persen dan sangat efisien yang ditunjukkan dengan rasio efisiensi 51 persen.

Pengujian yang keempat H_4 , H_5 dan H_8 menunjukkan bahwa rasio belanja aparatur memiliki nilai sig 0.782>0.05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan rasio belanja aparatur antar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010. Sedangkan untuk belanja pelayanan publik memiliki nilai sig 0.353>0.05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan rasio rasio belanja publik antar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010. Pengujian selanjutnya, H_8 menunjukkan rasio utang terhadap total pendapatan memiliki nilai sig 0.289>0.05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H8 ditolak yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan rasio utang terhadap total pendapatan antar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010. Penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susantih dan Saftiana,(2010:6) telah melakukan penelitian tentang perbandingan indikator kinerja keuangan pemerintah propinsi se-sumatera bagian selatan dengan indicator kemandirian, efektifitas dan aktifitas keuangan daerah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis

aktivitas keuangan daerah serta uji beda Kolmogorof smirnov. Hasil analisis kemandirian dan efektifitas keuangan daerah menunjukkan bahwa Propinsi Lampung memiliki peringkat tertinggi dan hasil analisis aktifitas keuangan daerah menunjukkan bahwa Propinsi Sumatera Selatan memiliki nilai rasio belanja terendah. Selain itu digunakan uji beda Kolmogorof smirnov dengan hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah pada lima Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan.

Pengujian selanjutnya, H_6 dan H_7 rasio DSCR memiliki nilai sig 0.022<0.05 dan dapat disimpulkan bahwa H6 diterima yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan rasio DSCR antar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010.Sedangkan untuk pengujian H_7rasio utang terhadap PAD memiliki nilai sig 0.002<0.05 dan dapat disimpulkan bahwa H8 diterima yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan rasio utang terhadap PAD antar Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010.Penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan olehErwansyah (2003: 55) dalam Susantih dan Saftiana (2010:6) pada penelitiannya tentang pengaruh tingkat hutang terhadap kinerja keuangan dan rasio harga saham perusahaan publik kelompok *Jakarta Islamic Index* menyatakan bahwa tingkat hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan terhadap harga saham tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Indikator kinerja keuangan yang digunakan adalah *leverage ratio, ROE,* dan *ROI.* Medote penelitian menggunakan metode

Pengujian yang terakhir, H_9 rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktifitas (rasio keserasian, rasio utang terhadap PAD, rasio utang terhadap total pendapatan dan rasio DSCR).Dapat dilihat nilai sig 0.000<0.05 dapat disimpulkan bahwa H_9 diterima, berarti terdapat berbedaan yang signifikan rasio kinerja keuangan antar Kabupaten/Kota antara tahun 2006-2010.Penelitian ini mendukung hipotesis yang di ajukan dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana (2008: 72) dalam Susantih dan Saftiana (2010:6) melakukan penelitian mengenai analisis kinerja atas laporan keuangan Pemerintah Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan dengan indikatror kemandirian keuangan daerah, efektifitas, efisiensi, aktivitas dan perkembangan APBD. Teknik analisis yang digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk melihat peringkat evaluasi pelaksanaan laporan keuangan Pemda Propinsi Se-Sumbangsel dan untuk melihat urutan peringkat evaluasi pelaksanaan laporan keuangan Pemda Se-Sumbangsel dan untuk melihat elastisitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi.Hasil analisis menunjukkan bahwa Propinsi Sumatera Selatan menduduki peringkat pertama dalam evaluasi pelaksanaan laporan keuangan Pemda dan hasil analisis elastisitas menunjukkan secara rata-rata kelima propinsi memiliki nilai elastisitas pendapatan asli daerah yang inelastis. Selain itu juga digunakan uji beda Kolmogorof -Smirnov dengan hasil bahwa terdapat perbedaan yang nyata atas evaluasi pelaksanaan Laporan Keuangan pada Propinsi se-Sumatera bagian Selatan.